

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan sesungguhnya bersifat terbuka, demokratis, tidak diskriminatif, dan menjangkau semua warga negara tanpa kecuali. Dalam konteks pendidikan untuk semua, anak-anak yang mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial emosional, gangguan perseptual, gangguan motorik, atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan seperti warga negara yang lain. Untuk itu pemikiran dan realisasi ke arah upaya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi mereka harus terus dilakukan.

Pendidikan diharapkan menghasilkan pembaharuan atau *inovasi* yang bisa dilakukan oleh semua anak, meskipun tiap anak hasilnya akan berbeda dikarenakan potensi yang berbeda (Palmer, 2003: 71). Konsep ini mengandung pengertian bahwa meskipun dilakukan dengan materi dan metode yang sama,

Pendidikan dalam perkembangannya mengalami perubahan, prinsip pendidikan memandang semua manusia mempunyai nilai yang sama, dan bahwa setiap anak harus mendapatkan pengasuhan dan memperoleh pendidikan yang relevan untuk hidup yang bermartabat. (Befring, 2003 : 63) Pengakuan dan perubahan-perubahan cara pandang secara bertahap menghasilkan praktek integrasi dan pada akhirnya memulai proses menuju

inklusi (Skjorten, 2003: 37). Skjorten, seperti dikutip Badriyah (2005: 2) menjelaskan lebih lanjut bahwa upaya untuk membuat agar pendidikan dapat diakses oleh semua anak sudah diupayakan dalam waktu 40 – 50 tahun terakhir dengan melihat sejarah peristiwa dan publikasi berikut:

- 1948 Deklarasi Hak Asasi Manusia – termasuk hak atas pendidikan dan partisipasi penuh di masyarakat untuk semua orang – PBB.
- 1989 Konvensi Hak Anak (PBB, diumumkan tahun 1991).
- 1990 Pendidikan untuk semua : Konferensi dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand, menghasilkan tujuan utama berikut ini :
 - Membawa semua anak masuk sekolah.
 - Memberikan semua anak pendidikan yang sesuai.
 Dalam prakteknya sesungguhnya ini tidak mencakup anak-anak yang berkebutuhan khusus (UNESCO, diumumkan Tahun 1991 dan 1992).
- 1993 Peraturan standar tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat (PBB, diumumkan Tahun 1994).
- 1994 Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif (UNESCO diumumkan pertama Tahun 1994, laporan akhir Tahun 1995).

Indonesia tanggal 11 Agustus 2004 dalam acara Lokakarya Nasional Menuju Pendidikan Inklusif di Bandung, mengeluarkan Deklarasi Indonesia “Menuju Pendidikan Inklusif”. Isi deklarasi tersebut di antaranya menghimbau pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, dapat menjamin setiap anak sebagai individu yang bermartabat, mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan bermutu tanpa perlakuan diskriminatif.

Model pendidikan saat ini pada umumnya merupakan *segregasi*. Hal ini diartikan bahwa anak-anak atau siswa diajarkan untuk menjalin hubungan

hanya dengan anak-anak yang sama, padahal lingkungan yang ada di sekitarnya penuh dengan perbedaan dan keunikan.

Model *segregasi* berimplikasi kepada berkurangnya rasa empati dan sikap positif terhadap kondisi orang lain, anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan tidak bisa merangsang anak untuk lebih dinamis dan atraktif. Anak-anak dalam kelas reguler dianggap mempunyai kemampuan yang sama, sehingga anak-anak mendapatkan tuntutan yang sama dalam pencapaian target kurikulum (pembelajaran).

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru umumnya metode klasika berupa ceramah. Media yang digunakan cenderung pada media visual berupa gambar, padahal tipe anak beragam ada yang *auditif* dan *sensorik*. Kondisi ini menyebabkan terjadinya problem belajar dalam kelas. Anak yang mengalami problem belajar atau berkebutuhan khusus biasa disebut anak bodoh, dan mereka ditinggal atau diabaikan dalam proses pembelajaran. Akibat lebih jauh bagi anak problem belajar ini tidak akan naik kelas.

Model *segregasi* menjadikan seorang ABK merasa minder, karena dikelompokkan dengan ABK lain yang mempunyai kekurangan yang sama. Situasi ini menyebabkan mereka merasa tidak diterima di lingkungan masyarakat umum. Kondisi demikian secara sosiologis kurang menguntungkan, karena ABK tidak bisa bergaul dengan anak-anak normal lain, padahal interaksi sosial dengan berbagai karakter anak diasumsikan mampu menumbuhkan kedewasaan dan kecakapan anak-anak. Secara

pedagogik, dengan kondisi homogen tantangan motivasi anak akan menjadi seragam atau bahkan berhenti, tidak ada gambaran anak yang berkemampuan menonjol, tidak ada anak yang berkemampuan kurang, yang ada hanya anak-anak dengan kemampuan yang seragam.

Direktorat PLB Dirjen Pendasmen Deppennas (2003) memaparkan estimasi jumlah anak berkelainan atau ABK sekitar 3 % dari populasi anak usia sekolah. Hasil sensus tahun 2001 menggambarkan baru sekitar 3,7 % (33.850 anak) dari mereka yang terlayani di sekolah reguler maupun Sekolah Luar Biasa (SLB). Data litbang Lembaga Pendidikan Al Firdaus, semester II tahun pelajaran 2004/2005 (Badriyah, 2004: 7) program kelas pendampingan telah menangani 15 siswa dengan kategori kesulitan belajar 11 anak dan 1 anak lamban belajar. Dari 15 siswa yang lepas kasus 7 siswa, dan masih melanjutkan pendampingan 8 anak.

Perkembangan di masyarakat sekarang menunjukkan adanya kecenderungan perubahan paradigma pendidikan bagi ABK dari sistem segregasi ke dalam sistem integrasi dan inklusif. (Munawir Yusuf, 2003:4). Pengembangan pendidikan inklusif menjadi salah satu program Direktorat Pendidikan Luar Biasa mulai Tahun 2001 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1986 tentang penyelenggaraan Pendidikan Terpadu di Indonesia yang seterusnya berkembang menjadi cikal bakal berkembangnya pendidikan inklusif (Nasichin, 2003 : 6).

Pendidikan inklusif tidak hanya berarti mengintegrasikan anak yang menyandang kecacatan fisik, sensori atau intelektual ke dalam sekolah umum atau hanya akses pendidikan bagi para pelajar yang terkucilkan. Inklusi merupakan sebuah proses dua arah untuk meningkatkan partisipasi dalam belajar dan mengidentifikasi serta mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk belajar sehingga anak berpartisipasi. Strategi inklusif harus berfokus kepada interaksi antara siswa dan lingkungannya. Ini merupakan proses untuk memenuhi dan merespon terhadap keanekaragaman kebutuhan semua siswa dan akan mengakibatkan perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur, dan, strategi belajar (Dalen dalam Johnsen dan Skorten, 2003 : 3).

Pendidikan inklusif adalah sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Semua anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. (Dedi Supriyadi. Dalam Johnsen and Skjorten. 2003: 9-10). Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi.

Uraian di atas menjelaskan bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik ke pendidikan hanya karena kondisi awal dan latar belakangnya. Inklusi bukan hanya bagi mereka yang luar biasa, melainkan berlaku untuk semua anak. Pendidikan inklusif dalam prakteknya menuntut terpenuhinya

berbagai persyaratan, antara lain dari segi sarana, tenaga kependidikan, kurikulum, manajemen waktu belajar dan model evaluasi.

Sekolah Inklusif menurut Stainback & Stainback yang dijelaskan oleh Sunardi sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi. (Munawir Yusuf, 2003: 1-2). Selanjutnya Sunardi juga menjelaskan bahwa definisi sejenis dibuat oleh Staub dan Peck (Sunardi, 2003: 2) yang mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan ALB tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif mengandung unsur-unsur, yaitu, 1) pendidikan untuk semua, 2) mengintegrasikan ABK di kelas reguler, 3) setiap anak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, dan 4) pendidikan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat anak.

Sekolah inklusif dijadikan pilihan alternatif model sekolah dengan alasan; *pertama*, inklusi akan menghasilkan anak berkebutuhan khusus meraih prestasi lebih tinggi baik secara akademik maupun sosial. *Kedua*, perpindahan ke dalam *setting* sekolah reguler akan memberikan bantuan pada anak

berkebutuhan khusus untuk penyesuaian diri dengan lingkungan. *Ketiga*, anak dengan fungsi normal akan mendapat keuntungan dengan kesediaannya untuk mengetahui dan mengerti orang dengan tingkat level fungsi yang berlainan. (Whitherington & Parke dalam Nuryati, 2004: 4).

Model pendidikan inklusif memiliki kelebihan dari model pendidikan *segregasi*, memperhatikan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai berikut:

1. *Ketercapaian target kurikulum ABK dikaitkan dengan kemampuan anak normal.* Kurikulum nasional disusun berdasarkan standar kemampuan anak normal, sehingga bagi ABK akan mendapatkan kesulitan mengikuti kurikulum nasional. Oleh karena itu, bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dituntut mengadakan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan khusus peserta didik dituangkan dalam Program Pengajaran Individual atau Program Pendidikan Individual yang disingkat PPI. (Direktorat PLB Dirjen Pendasmen Pennas 2003: 4). Penyesuaian kurikulum tidak mudah, karena terkait dengan kemampuan SDM, biaya, dan sistem administrasi sekolah, sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri bagi sekolah yang bermaksud menyelenggarakan pendidikan inklusif.
2. *Manajemen sekolah penyelenggara inklusif.* Manajemen sekolah mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen

pendidikan sekolah. Komponen-komponen pendidikan sekolah meliputi kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, lingkungan, dan kegiatan belajar-mengajar. Dalam hal ini, apabila dalam satu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya menampung anak normal tetapi juga anak yang membutuhkan pendidikan khusus, maka menuntut penyesuaian (modifikasi) pengelolaan dalam tiap-tiap komponen pendidikan.(Usman. 2004 : 4)

Sekolah inklusif yang mempunyai peserta didik normal dan yang membutuhkan pendidikan khusus agar ABK tidak terabaikan, maka diperlukan manajemen pelayanan khusus. Manajemen pelayanan khusus mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pendanaan, dan lingkungan.. (Direktorat PLB Dirjen Pendasmen Pennas 2003: 16).

3. *Kesiapan sarana prasarana untuk penyelenggaraan pembelajaran inklusif.* Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai, disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Sarana pendidikan terkait dengan sarana pembelajaran, sarana terapi dan sarana administrasi pembelajaran.

Direktorat PLB Dirjen Pendasmen Deppennas menggolongkan sarana prasarana bagi sekolah inklusif ada dua yaitu sarana prasarana umum (seperti halnya sekolah umum) juga sarana prasarana yang sesuai dengan jenis kelainan anak atau kebutuhan anak (sarana prasarana khusus). (Direktorat PLB Dirjen Pendasmen Pennas 2003: 3).

Ada dua masalah atau tantangan yang dihadapi sekolah inklusif terkait dengan sarana prasarana, yaitu sarana umum dan sarana khusus. Sarana-prasarana khusus ini pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan ABK.

4. *Kesiapan guru dalam proses pembelajaran.* Guru sekolah umum tidak semuanya mempunyai bekal pengetahuan dan pengalaman menangani ABK. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu membekali guru mereka pengetahuan melayani ABK. Guru atau tenaga yang perlu dimiliki sekolah inklusif adalah : guru pendidikan luar biasa (PLB), guru Okupasi Terapi (OT), psikolog dan konselor.
5. *Penyelenggaraan program pendidikan inklusif membutuhkan biaya tambahan dibandingkan dengan penyelenggaraan sekolah umum.* Konsekwensi dari pelayanan khusus memerlukan biaya tambahan. Biaya bagi ABK tidaklah sedikit, tambahan yang biasa diperlukan adalah untuk penyediaan media dan alat peraga, administrasi pendukung, sarana terapi, dan gaji bagi tenaga khusus pendamping anak.
6. *Toleransi dari anak normal dengan ABK selama proses pembelajaran.* Kesadaran saling menghargai, menghormati, menerima atau toleransi dari anak normal dengan ABK kadang terjadi hambatan. Hal ini dikarenakan, ABK dipandang menghambat proses pembelajaran karena problem belajar yang mereka alami. Bisa jadi ABK untuk menguasai materi harus diterangkan berulang-ulang sementara bagi anak normal dengan satu kali penjelasan sudah langsung faham. Maka, agar proses pembelajaran berlangsung lancar diperlukan toleransi dari anak normal kepada ABK.

7. *Peran serta masyarakat dalam mendukung terlaksananya program inklusif.* Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama yang baik dan sinambung antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Peran serta aktif dari masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut lebih aktif membantu mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan. (Direktorat PLB Dirjen Pendasmen Pennas 2003: 7).

Permasalahan bagi sekolah inklusif, masyarakat yang mempunyai ego tinggi akan merasa enggan menyekolahkan anak mereka di sekolah penyelenggara inklusif. Belum semua masyarakat bisa menerima konsep inklusif, dengan alasan anak mereka yang normal atau pandai akan bergaul dengan ABK. Mereka mengkhawatirkan anak mereka ikut-ikutan menjadi lambat, prestasi anak mereka tidak bisa maksimal. Kondisi ini membuat partisipasi atau dukungan masyarakat terhadap sekolah inklusif menjadi kurang.

8. *Budaya lingkungan sekolah untuk menerima kehadiran anak inklusif.* Budaya lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Apabila di lingkungan sekolah belum tercipta budaya toleransi, saling menghargai, saling bekerja sama dan memandang bahwa manusia itu di mata Allah SWT sama, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak akan berhasil.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengkaji permasalahan sejauh mana pendidikan inklusif khususnya di tingkat Taman Kanak-kanak. Penulis memilih TPP Al Firdaus sebagai obyek penelitian dikarenakan sekolah ini secara profesional telah menangani anak dengan problem belajar dalam program kelas pendampingan. Program Kelas Pendampingan ini di bawah Unit Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (PUSPA) Al Firdaus.

Penulis memberi judul tesis ini Pola Pendampingan Program Inklusi di Taman Pendidikan Prasekolah Al Firdaus. Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan untuk bahan perbaikan di Al Firdaus, dan menjadi referensi bagi sekolah-sekolah yang tertarik menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus utama yang akan diteliti yaitu pola pendampingan program inklusi di Taman Pendidikan Pra Sekolah Al Firdaus Surakarta. Fokus tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah cara merancang program kelas pendampingan yang dikembangkan oleh TPP Al Firdaus Surakarta dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program kelas pendampingan dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif di TPP Al Firdaus Surakarta?

3. Bagaimanakah teknik evaluasi yang dikembangkan program kelas pendampingan dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif di TPP Al Firdaus Surakarta?
4. Bagaimanakah karakteristik faktor pendukung dan penghambat program kelas pendampingan TPP Al Firdaus Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola pendampingan program inklusi di Taman Pendidikan Pra Sekolah Al Firdaus Surakarta. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Cara merancang program kelas pendampingan yang dikembangkan oleh TPP Al Firdaus Surakarta dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif.
2. Pelaksanaan program kelas pendampingan dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif di TPP Al Firdaus Surakarta.
3. Teknik evaluasi yang dikembangkan program kelas pendampingan dalam rangka menangani ABK dengan pendekatan inklusif di TPP Al Firdaus Surakarta.
4. Karakteristik faktor pendukung dan penghambat program kelas pendampingan TPP Al Firdaus Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik yang bersifat teoretis maupun praktis.

1. Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan dalam penelitian tentang sistem pendidikan dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada TPP Al Firdaus guna mewujudkan program kelas pendampingan yang lebih efektif.

b. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang alternatif penyelenggaraan program pendidikan bagi ABK dengan pendekatan inklusif.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pemikiran tentang pendidikan yang lebih berorientasi pada potensi anak.

d. Bagi Orangtua.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana pada orang tua tentang heteroginitas potensi anak.

E. Daftar Istilah

1. Program Kelas Pendampingan TPP Al Firdaus

Program kelas pendampingan TPP Al Firdaus adalah wadah atau tempat yang melaksanakan kegiatan layanan (intervensi) khusus bagi siswa TPP Al Firdaus yang mengalami problem belajar atau ABK kerjasama TPP Al Firdaus dengan PUSPA Al Firdaus. Layanan khusus (intervensi) merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa *learning disabilities*, *learning problem*, dan *slow learner*, dan anak berbakat intelektual dengan memberikan program layanan individual.

2. Pendidikan Inklusif

Konsep pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum (reguler), dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat.